

**PERSEPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA TERHADAP
IMPLEMENTASI SISTEM
*E-PROCUREMENT***

Ita Akyuna Nightisabha

*Alumni MAKSI Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009*

Djoko Suhardjanto

*Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta
e-mail: suhardjanto04@yahoo.com*

Bayu Tri Cahya

*Alumni MAKSI Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009*

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of electronic procurement of goods and services by the Government City of Yogyakarta, as an effort to create good governance especially in terms of procurement. This study compares the perceptions of user that consist of procurement committee and the providers of goods and services.

Research location is in Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) of Government City of Yogyakarta as a system developer with the sample of the procurement committee and partner of goods and services that are spread in Yogyakarta and surrounding areas.

This research uses t-test by using a reference measurement system on the success of end-user computing satisfaction developed by Torzadeh and Doll (1991). The results show a difference of perception between the committee and the procurement of goods and services providers to the implementation of e-proc system. There is difference in perception between users of e-procurement supplier of goods / services and the procurement committee.

Implementation of e-procurement system is being run by the Government City of Yogyakarta is currently has not been relatively applied, because the technology gap that has led to the differences in perception between the committee and the procurement of goods and services providers.

Keywords: *good governance, e-procurement, perception*

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan transparansi publik adalah dengan Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengem-

bangan *e-government*. Pengembangan *e-government* merupakan upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka

meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Selain permasalahan rendahnya pelayanan publik pada instansi pemerintahan, kegiatan pengadaan barang dan jasa pada sektor publik masih mempunyai banyak masalah baik itu prosedur maupun hasilnya. Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2003 yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel, masih menyisakan berbagai kasus korupsi yang banyak ditemukan (www.kpk.go.id, 2009).

Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan sistem pengadaan barang melalui *e-procurement*, menjadi obyek penelitian ini karena belum adanya penilaian yang menjadi dasar dalam menilai efektivitas dan efisiensi sistem pengadaan barang dan jasa secara *on-line* serta dalam pengembangan sistem tersebut di masa datang. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Yogyakarta didirikan pada bulan Juli tahun 2008 sebagai bagian dari upaya pemerintah kota Yogyakarta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hambatan implementasi *e-procurement* adalah kesiapan sumber daya manusia terkait masalah mental, masih terbatasnya pengetahuan transaksi secara *on-line* dikalangan *vendors* maupun unit-unit di perusahaan, kompatibilitas dan kehandalan sistem yang dibangun masih diragukan, auditor khususnya Badan Pemeriksa Keuangan belum sepenuhnya menggunakan standar transaksi *on-line*, dan belum adanya aturan dan standar pelaksanaan *e-procurement*.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengukur keberhasilan implementasi sistem *e-procurement* yang diukur dari persepsi dan

tingkat kepuasan pengguna akhir telah dilakukan pada pemerintah kota Surabaya. Nurliya (2007) mengukur kepuasan pengguna akhir yaitu para pengguna barang/jasa yang memanfaatkan layanan *e-procurement* menghasilkan gambaran bahwa implementasi sistem *e-procurement* di pemerintah kota Surabaya telah berhasil dilakukan.

Penelitian sejenis yang dilakukan pada obyek yang sama yaitu pemerintah kota Surabaya yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem *e-procurement* dilakukan oleh Wijayanto (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan pengukuran *gap analysis* dari nilai ekonomis yang dihasilkan oleh penyedia barang/jasa dan pengelola. Hasil yang didapat dari penilaian sistem menunjukkan bahwa kepuasan pengguna yaitu penyedia barang/jasa dan pengelola sistem menunjukkan tingkat kepuasan yang sama, sehingga dari penelitian ini juga didapat hasil bahwa penerapan sistem *e-procurement* yang sedang berjalan pada pemerintah kota Surabaya telah berhasil.

Penelitian yang mengukur persepsi masyarakat terhadap penerapan sistem baru pengadaan barang dan jasa sektor publik dilakukan oleh Rafiqul (2007). Penelitian ini berlatar belakang proses pengadaan barang/jasa yang ada di Bangladesh. Hasil dari penelitian ini adalah 70% para pengguna layanan memahami prosedur pengadaan dan 30% terpecah kedalam berbagai pendapat yaitu cukup paham dan tidak paham.

Dengan adanya beberapa temuan penelitian dan beberapa kasus dalam implementasi sistem *e-procurement* di beberapa pemerintah daerah tersebut, baik kesiapan pemerintah daerah seperti yang dilakukan oleh Prabowo (2009) pada pemerintah Kabupaten Sleman terhadap rencana implementasi sistem *e-procurement* maupun penilaian atas sistem yang sedang berjalan pada pemerintah kota Surabaya yang dilakukan oleh Nurliya (2007) dan Wijayanto

(2008), menjadi alasan pemilihan topik ini. Mengingat kota Yogyakarta telah menerapkan sistem *e-procurement* yang saat ini sedang berjalan pada tahun kedua, maka penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi awal sistem *e-procurement* pada pemerintah kota Yogyakarta dengan melihat persepsi pengguna layanan yaitu panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa atas aplikasi sistem *e-procurement*.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

E-commerce

E-commerce adalah penggunaan media elektronik sebagai wadah dalam pertukaran produk antar individu satu dengan yang lain dan antar individu dan kelompok lain yang berbasis intranet dan ekstranet (Jaworski, 2002). Tujuan utama dari *e-commerce* adalah mengurangi biaya transaksi dan menyelaraskan semua proses (Awad, 2004).

Sejarah perkembangan *e-commerce* diawali dengan pengiriman dokumen pemesanan pembelian dan tagihan secara elektronik dalam sebuah transaksi komersial kemudian berkembang menjadi suatu wadah yang disebut "perdagangan *web*" pada tahun 1994, yang meliputi semua kegiatan jual beli dimana telah digunakan piranti khusus yang menjamin kerahasiaan transaksi. Kematangan tahap ini terjadi pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan adanya penggunaan secara masal para pebisnis di Amerika dan Eropa (Setiawan, 2002). Kategori *e-commerce* meliputi:

1. *Business to business* (B2B). Umumnya menggunakan mekanisme *Electronic Data Interchange* (EDI), dimana aktivitas pada kategori ini melibatkan pasar *e-business* dan hubungan pasar langsung antar perusahaan.
2. *Business to consumer* (B2C). Kategori ini memiliki permasalahan yang berbeda. Mekanisme mendekati konsumen

menggunakan berbagai cara misalnya portal atau "*electronic shopping mall*".

3. *Consumer to consumer* (C2C). Keberhasilan besar dari beberapa perusahaan pelaku C2C yaitu mereka dapat membeli dan menjual ke satu sama lain dalam satu proses lelang (O'Brien, 2006).

E-procurement

Seperti halnya *e-commerce*, *e-procurement* merupakan transformasi mekanisme pengadaan secara manual (LKPP, 2009). Definisi *e-procurement* dari berbagai sumber yaitu:

1. Menurut Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Australia (Australian Government Information Management, AGIMO), *e-procurement* merupakan pembelian antar-bisnis (*business-to-business*), B2B) dan penjualan barang dan jasa melalui internet (www.agimo.gov.au, 2001).
2. Bank Dunia menyebut *e-procurement* dari sisi pemerintahan sebagai *electronic government procurement* atau *e-GP* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik (Ippolito, 2003).
3. Palmer (2003) menyebutkan *e-procurement* adalah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen seluruh aktivitas pengadaan barang melalui internet, yang meliputi semua aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.
4. Menurut Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006 dan mulai diterapkan sejak tahun 2007 dengan berdirinya LKPP, *e-procurement* atau pengadaan barang/ja-

sa pemerintah yang selanjutnya disebut PPE adalah sistem pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara/TNI/Polri/Komisi/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Bank Indonesia (BI)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum (BLU), yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, yang meliputi: *e-Lelang Umum (e-Regular Tendering)*; *e-Lelang Penerimaan (e-Reverse Tender)*, *e-Pembelian (e-Purchasing)*, *e-Penawaran Berulang (e-Reverse Auction)*, dan *e-Seleksi (e-Selection)*.

Berdasarkan definisi *e-procurement* dari berbagai sumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* adalah kegiatan yang dilakukan oleh sektor publik baik itu pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga publik lain termasuk Badan Usaha Milik Negara dengan menggunakan fasilitas teknologi internet yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan landasan hukum Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006.

Fitur yang ada dalam *e-procurement*

Fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dalam *e-procurement* menurut Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006 yaitu:

1. *E-Lelang Umum (e-Regular Tendering)* adalah pelelangan umum dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa

mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan menggunakan media elektronik yang berbasis pada *web/internet* dengan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi;

2. *E-Lelang Penerimaan (e-Reverse Tendering)* adalah proses untuk mendapatkan harga yang paling menguntungkan bagi negara atas penjualan, penyewaan, dan pemanfaatan barang/jasa milik negara secara elektronik;
3. *E-Pembelian (e-Purchasing)* adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara *e-Penawaran Langsung (e-Price Quotation)*, *e-Penawaran Berulang (e-Reverse Auction)*, atau *e-Pembelian Langsung (e-Direct Purchasing)*;
4. *E-Penawaran Langsung (e-Price Quotation)* adalah pembelian barang/jasa yang prosesnya dilakukan secara elektronik untuk barang/jasa yang tersedia banyak di pasar dan yang kualitas barang/jasanya sudah pasti dengan cara meminta penawaran harga langsung kepada seluruh penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam sistem PPE (Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik);
5. *E-Penawaran Berulang (e-Reverse Auction)* adalah pembelian barang yang prosesnya dilakukan secara elektronik untuk barang tertentu yang tersedia banyak di pasar, jumlah penyedia barang banyak, kualitas barang sudah pasti, dan batas harga tertinggi telah ditentukan, serta diberikan kesempatan kepada peserta untuk menawarkan harga berulang kali sampai harga terendah dalam kurun waktu yang ditetapkan;
6. *E-Pembelian Langsung (e-Direct Purchasing)* adalah pembelian barang yang tersedia banyak di pasar dan yang kualitas barang sudah pasti melalui *e-katalog* yang tersedia dalam sistem PPE (Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik);

7. *E-Seleksi (e-Selection)* adalah pengadaan jasa konsultasi yang prosesnya dilakukan secara elektronik yang dilakukan dengan metoda seleksi secara umum dan terbuka;
8. *E-Katalog (e-Catalog)* adalah daftar barang/jasa dan harga dalam sistem PPE (Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik) yang bersumber dari pemasok/pabrik/penyedia jasa, yang isinya sekurang-kurangnya memuat daftar, nama, spesifikasi, dan harga produk.

Perkembangan *E-procurement* di Indonesia

Pelaksanaan *e-procurement* di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh Bappenas sebelum LKPP terbentuk, dengan menggunakan lima wilayah sebagai proyek percontohan yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Tengah dan Sumatera Barat. *E-announcement* (lelang serentak) merupakan tahap awal dari sistem *e-procurement* dimana didalamnya terdapat tahapan sosialisasi bagi semua pelaksana *e-procurement* (LKPP, 2009). *Pilot project* tersebut dimulai dari informasi pengadaan dan pelatihan bagi semua pelaku usaha pada semua golongan.

E-announcement pertama kali dikenalkan oleh pemerintah kota Surabaya (www.wartaegov.com, 2009). Setelah *e-announcement*, Departemen Pekerjaan Umum menjadi instansi pertama yang melakukan uji coba *e-procurement* pada tahun 2004 dalam format semi *e-procurement*. Meskipun keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala sehingga hanya diikuti oleh sedikit peminat, namun pelaksanaan *e-procurement* pada lingkungan DPU mampu menjadi motivator bagi instansi lain.

Setelah mengawali *e-procurement* dengan mengadakan *e-announcement*, Pemkot Surabaya kembali memulai kegiatan *e-procurement* dengan penyempurnaan sistem. Keberhasilan Pemkot Surabaya melakukan kegiatan *e-procurement* kemudian diikuti

oleh berbagai instansi misalnya Departemen Luar Negeri, Garuda Indonesia, Pemerintah Kota Bogor, dan pada tahun 2008, Pemerintah Kota Yogyakarta juga meresmikan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE) sebagai wadah dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* bagi instansi di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta (www.wartaegov.com, 2009).

Manfaat adanya *e-procurement* bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang/jasa serta masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah yang dapat diakses secara terbuka. Dengan *e-procurement*, instansi penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana, sedangkan bagi para penyedia barang/jasa dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi (Handoko, 2009).

Keberhasilan penerapan *e-procurement* di berbagai instansi pemerintah yang sudah melaksanakan sistem tersebut kemudian diikuti oleh banyak instansi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun departemen. Daerah lain yang sedang merencanakan perubahan sistem pengadaan barang/jasa dari model konvensional ke sistem *on-line* sedikitnya 20 pemerintah kabupaten maupun kota dan beberapa departemen diantaranya Depkominfo dan Perindustrian. Sebagian besar pemerintah provinsi dan lembaga tinggi pendidikan bahkan sudah melakukan inisiasi awal maupun sosialisasi sistem tersebut, misalnya Provinsi Jawa Tengah, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Institut Teknologi Surabaya, dan Universitas Negeri Padang (LKPP, 2009).

Dasar Hukum *E-procurement* di Indonesia

Implementasi *e-procurement* agar sesuai dengan tujuan dan prinsip pengadaan didasarkan atas peraturan pemerintah yaitu (www.bappenas.go.id, 2009):

1. Undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
2. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006, tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2003.
4. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2008, tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.
5. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan yang digunakan dalam implementasi sistem *e-procurement* pada masing-masing lembaga publik di Indonesia menggunakan dasar Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya dan diikuti oleh berbagai aturan dibawahnya hingga peraturan pelaksana masing-masing lembaga.

Dalam pelaksanaan *e-procurement* di kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 31 tahun 2008 dan perubahannya pada tahun 2009 dengan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 18 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta.

Manfaat dan Tantangan pelaksanaan *E-procurement*

Sebagai salah satu alat dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme sebagai manfaat

secara makro dari *e-procurement*, manfaat langsung yang diharapkan dari penerapan sistem baru ini adalah proses yang lebih singkat terutama dari segi waktu dan birokrasi, serta penghematan biaya dalam proses pengadaan (Hardjowijono, 2009).

Dalam peraturan perundangan yang mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa yaitu Keputusan Presiden 80/2003 dan Peraturan Presiden nomor 8/2006 dinyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memudahkan *sourcing* dalam memperoleh data dan informasi tentang barang dan jasa, spesifikasi teknis dan harga maupun penyedia barang dan jasa yang memenuhi kriteria.

Manfaat dari *e-procurement* adalah tercapainya kolaborasi yang baik antara pembeli dan pemasok, mengurangi penggunaan tenaga lapangan, meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya transaksi dan siklus pengadaan, tingkat persediaan yang rendah dan transparansi yang baik (Palmer, 2003).

Menurut Michael Hammer dan James Champy (1994), ekonomi global berdampak terhadap 3C yaitu *customer, competition, dan change*. Pelanggan menjadi penentu, pesaing menjadi banyak dan perubahan menjadi konstan. Beberapa orang menolak perubahan dan beberapa orang yang lain menerima dan menghadapi hal tersebut karena mereka menganggap bahwa perubahan adalah perlu agar proses dan dampak dari perubahan tersebut membawa hal positif.

E-procurement sebagai salah satu upaya dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, mempunyai beberapa tantangan diantaranya pemahaman dan penolakan atas peralihan sistem pengadaan barang dan jasa konvensional ke sistem baru secara *on-line*. Penolakan atas sebuah perubahan adalah wajar. Reaksi penolakan atas implementasi *e-procurement*

pernah terjadi di provinsi Jawa Barat. Penolakan tersebut datang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan beberapa asosiasi rekanan jasa konstruksi (www.lkpp.go.id, 2009). Alasan penolakan tersebut dikarenakan sistem yang belum sepenuhnya dinilai siap oleh beberapa kalangan.

Reaksi penolakan atas penerapan sebuah sistem baru tersebut sejalan dengan beberapa teori penolakan oleh beberapa ahli. Teori penolakan oleh Kling (Markus, 1983) bahwa penerapan sistem baru melahirkan beberapa sikap penolakan yaitu *Rational, Structural, Human Relations, Interactionist, Organizational Politics, dan Class Politics*. Dari beberapa sikap tersebut menunjukkan reaksi yang berbeda-beda, mulai dari bertahan terhadap sistem lama hingga menghambat dan merusak sistem baru.

Hambatan lain dalam implementasi *e-procurement* yaitu adanya kesenjangan digital, metodologi, kepentingan kelompok dan resistansi individual atas keengganan untuk berubah (www.bappenas.go.id, 2009). Tantangan lain dalam penerapan sistem *e-procurement* yaitu faktor teknis berupa standar keamanan dan pengembangan sistem itu sendiri (Setiawan, 2002). Tantangan yang bersifat teknis atau aksesibilitas menjadi hal penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan *e-procurement* (Bruno, 2005).

Besarnya biaya pengembangan sistem menjadi kendala bagi beberapa perusahaan non profit di Amerika Serikat. Guna menyiasati hal tersebut, mereka tidak segan untuk mengadopsi keberhasilan sistem yang dimiliki oleh perusahaan privat untuk diterapkan di beberapa organisasi lain (Walker dan Harland, 2008).

Implementasi *E-procurement*

Beberapa negara yang telah berhasil menerapkan implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik diantaranya

Australia dan Skotlandia. Keberhasilan kedua negara tersebut ikut andil dalam perkembangan sistem *e-procurement* di negara lain termasuk Indonesia.

Negara Australia sebagai salah satu negara pelopor pelaksanaan *e-procurement* yang dimulai pada tahun 1990 telah menggunakan *e-procurement* sebagai salah satu alat dalam efisiensi pengeluaran anggaran serta mempermudah dalam penyediaan barang dan jasa (*Review of e-procurement Project*, 2005). Berdasarkan tahapan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan di negara Australia. Upaya memperkuat sistem pengadaan secara konvensional kemudian didukung dengan sistem baru secara elektronik.

Negara lain yang telah sukses dalam mengembangkan sistem *e-procurement* adalah Skotlandia (www.e-procurementscotlandia.com, 2009). *E-procurement Scotlandia* (EPS) didirikan pada tahun 2002 dan saat ini menjadi salah satu yang paling komprehensif dan inovatif serta sukses dalam penerapan *e-procurement* di sektor publik. Salah satu bukti kesuksesan pelaksanaan *e-procurement* di Skotlandia yaitu bertambahnya tiap tahun jumlah organisasi sektor publik yang berpartisipasi dalam EPS. *E-procurement* di Skotlandia adalah sebuah pendekatan untuk pengadaan sektor publik yang cepat, berkelanjutan dan mafaat yang signifikan bagi organisasi yang berpartisipasi.

Keberhasilan negara Australian dan Skotlandia menjadi tolak ukur implementasi *e-procurement* di Indonesia yang dipelopori oleh pemerintah kota Surabaya dan Departemen Pekerjaan Umum (DPU), bukan saja dari implementasi awal sistem maupun keberhasilan dari segi rantai nilai pelaku *e-procurement*.

Pelaksanaan *e-procurement* di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2009. Sebagai pelopor sistem *e-procurement*, keberhasilan pemerintah

kota Surabaya dalam menerapkan sistem *e-procurement* berupa efisiensi anggaran hingga 10% karena adanya standarisasi harga dan analisa standar belanja, efisiensi terhadap alokasi yang telah ditetapkan hingga 25%, terencananya proses pengadaan barang/jasa, dan pelaporan yang jelas atas kegiatan dan penyerapan anggaran dapat diakses oleh pimpinan dan masyarakat secara terbuka dan kapan saja melalui internet. Dari sisi penyedia barang dan jasa, implementasi *e-procurement* kota Surabaya mampu memberikan kesempatan merata dan lebih luas kepada pengusaha kecil menengah hingga 96,4% perusahaan lokal (www.surabaya-e-procurement.or.id, 2009).

Penilaian Sistem *E-procurement*

Model dasar kesuksesan sistem teknologi informasi mengalami banyak perkembangan. Model yang baik adalah model yang lengkap dan sederhana (Jogiyanto 2007). Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (D&M IS Success Model) menggunakan beberapa faktor atau komponen yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pemakai, dampak individual dan dampak organisasi (DeLone, 2002).

Konsep karakteristik sistem (sistem *characteristics*) dikemukakan oleh Emery (1971) sebagai pengukur kualitas sistem informasi. Karakteristik tersebut meliputi:

1. Isi dari basis data (*content of the database*).
2. Agregasi dari rincian-rincian (*agregation of details*).
3. Faktor manusia (*human factor*).
4. Waktu respon (*response time*).
5. Akurasi sistem (sistem *accuracy*).

Karwan dan Wallace (1982) menjelaskan pengukur keberhasilan sistem dengan keandalan, waktu respon, kemudahan penggunaan, dan kemudahan dipelajari sebagai pengukur empiris kualitas sistem informasi.

Salah satu teori yang mendukung keberhasilan sistem *e-procurement* dikemukakan oleh Bruno (2005). Aksesibilitas menjadi hal yang sangat penting dalam menilai keberhasilan sistem *e-procurement*. Temuan hasil penelitian ini adalah untuk mencapai tingkat optimal dari proses dan sistem *e-procurement* pada sektor publik adalah aksesibilitas portal *e-procurement* sektor publik lebih kompleks karena dipengaruhi oleh persepsi pengguna dan tampilan atau layanan portal *e-procurement*. Penilaian atas keberhasilan sistem *e-procurement* ini sejalan dengan teori dasar atas keberhasilan sistem oleh Srinivasan (1985) yang mengukur keberhasilan sistem dengan dimensi waktu respon, keluwesan sistem, dan keaksasan sistem.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pengertian, hambatan dan beberapa implementasi *e-procurement* di Australia, Skotlandia, dan juga beberapa sektor publik di Indonesia, maka dalam penelitian ini penulis kembangkan beberapa aspek yang nantinya menjadi dasar dalam penilaian keberhasilan sistem *e-procurement* khususnya yang ada di pemerintah Yogyakarta. Hal tersebut juga didukung dengan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penilaian keberhasilan sistem teknologi dan aspek teknis yang mendukung keberhasilan sebuah sistem *e-procurement*.

Pengukuran dalam penilaian sistem *e-procurement* dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Torkzadeh dan Doll (1991) yang menilai keberhasilan sistem dengan membandingkan persepsi antar penggunanya. Torkzadeh dan Doll (1991) menilai kepuasan pengguna sebuah sistem dengan menggunakan ukuran berupa isi (*content*), keakuratan (*accuracy*), bentuk (*format*), kemudahan dalam penggunaan (*ease of use*), dan ketepatan waktu (*timelines*). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Paul Harrigan dan Elaine Ramsey

(2008) yang menyebutkan bahwa pengembangan sistem *e-procurement* berdasarkan fungsi dan integrasi antara SDM dan teknisnya. Hasil yang signifikan dilaporkan bahwa proses bisnis sejalan dengan penghematan biaya.

Dimensi yang digunakan dalam penelitian Torkzadeh dan Doll (1991) adalah gabungan dari berbagai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bailey dan Pearson (1983), serta Barki dan Huff (1985). Torkzadeh dan Doll (1991) menambahkan unsur penggunaan seperti yang dikemukakan oleh Karwan dan Wallace (1982) yaitu kemudahan penggunaan dan kemudahan dipelajari. Hal inilah menjadi apa yang disebut oleh Torkzadeh dan Doll (1991) sebagai *“general user satisfaction with a specific application”* yang berbeda namun harus dikembangkan. *“General user”* berfokus

pada karakteristik secara umum yang ada pada sebuah sistem sedangkan *“specific application”* ditandai dengan *“internal user satisfaction”* dengan salah satu pengukurannya adalah penggunaan.

Beberapa aspek digunakan oleh banyak peneliti kesuksesan sistem selama ini. Pengukuran keberhasilan sistem informasi bukan saja pengukuran tunggal yang terdiri dari kualitas sistem maupun kualitas informasi semata melainkan suatu konstruk multidimensi (Jogiyanto, 2007).

Konstruk atau dimensi yang digunakan Torkzadeh dan Doll (1991) maupun para peneliti lain telah mencakup berbagai dimensi tersebut. Beberapa pengukur kesuksesan sistem informasi yang sering digunakan oleh beberapa penelitian diantaranya seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1: Pengukur Kesuksesan Sistem

Dimensi	Pengukur-pengukur
Kualitas Sistem (Sistem Quality)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akurasi (accuracy) 2. Isi basis data (database content) 3. Kemudahan Penggunaan (ease of use) 4. Kemudahan dipelajari (ease of learning) 5. Realisasi dari kebutuhan-kebutuhan pemakai (Realization of user requirements)
Kualitas Informasi (Information Quality)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan (relevance) 2. Keinformatian (informativeness) 3. Bentuk (format) 4. Isi (content) 5. Akurasi (accuracy) 6. Kekinian (currency) 7. Ketepatanwaktuan (timeliness) 8. Kegunaan (usableness) 9. Kejelasan (clarity)
Penggunaan Informasi (information use)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya penggunaan (amount of use) / durasi penggunaan (duration of use) 2. Digunakan oleh siapa?
Kepuasan pemakai (user satisfaction)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan menyeluruh (overall satisfaction) 2. Kepuasan informasi : perbedaan antara informasi yang dibutuhkan dengan yang diterima (information satisfaction : difference between information needed and received)

Sumber: Jogiyanto (2007).

Konstruk/dimensi yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan sistem *e-procurement* mencakup berbagai dimensi dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu meliputi aplikasi sistem (*general user*) dan aspek penggunaan oleh pengguna (*internal user*). Aplikasi sistem secara umum meliputi isi sistem dan keinformasian sedangkan aspek penggunaan oleh pengguna meliputi siapa yang menggunakan dan bagaimana mereka menggunakannya. Penggabungan tersebut menjadi penting dalam mengukur aplikasi sistem yang terintegrasi mengingat penggunaan sistem tidak hanya digunakan oleh satu orang maupun divisi tertentu melainkan oleh beberapa pengguna. Penelitian yang dilakukan oleh Ilias et al (2007) terhadap implementasi sistem akuntansi pada sektor publik di Malaysia menitikberatkan pada hubungan manajemen terhadap sistem informasi akuntansi yang diukur melalui kepuasan para penggunanya.

Hal ini mereka lakukan karena mengingat sulitnya mengukur efektivitas sistem bila hal tersebut hanya dilakukan pada salah satu divisi pengguna sistem sehingga perlu dilakukan uji persepsi antar penggunanya. Penelitian serupa dengan obyek implementasi sistem *e-procurement* dilakukan oleh Jones (2009) pada salah satu sektor publik di negara Inggris. Jones (2009) membandingkan persepsi pengguna sistem *e-procurement*. Hal tersebut dilakukan guna mengukur keberhasilan sistem yang dilihat dari sisi pemerintah dan penyedia barang/jasa bahwa dengan *e-procurement* dapat mempengaruhi "*financial impact*" yang berupa penghematan biaya pengadaan.

Masing-masing pihak pengguna sistem *e-procurement* berharap mendapatkan dampak positif atas sistem *e-procurement*. Meskipun persepsi keduanya belum tentu selalu sama terutama pada awal implemen-

tasi sistem. Hal ini dimungkinkan karena adanya beberapa faktor diantaranya rantai birokrasi dan sumber daya manusia yang meliputi kendala kemampuan maupun keengganan pihak-pihak yang nantinya terlibat dalam proses pengadaan karena sudah terlampaui banyak tuduhan akan adanya kecurangan dalam pengadaan barang/jasa publik selama ini (www.wartaegov.com, 2009).

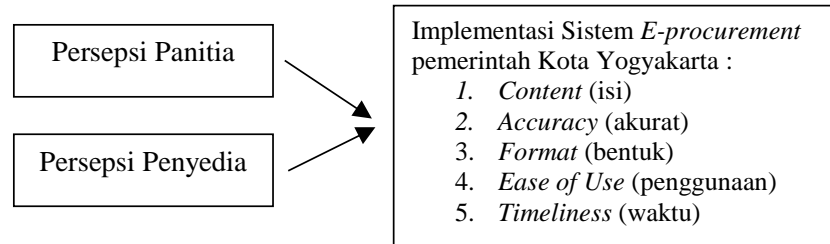
Banyaknya persoalan dalam pengadaan barang/jasa publik terutama dari sisi SDM telah banyak ditemukan di berbagai lembaga publik di Indonesia misalnya rendahnya tingkat kelulusan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa yang merupakan syarat wajib bagi panitia dan peserta pengadaan, pemahaman Keppres nomor 80 tahun 2003, dan kesiapan SDM dengan aplikasi sistem elektronik dalam *e-procurement* baik itu panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa (Puspito, 2007).

Berdasarkan beberapa temuan di lembaga publik di Indonesia pada proses pengadaan barang/jasa dan dimensi pengukuran sistem yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka untuk penelitian ini akan dikembangkan hipotesa yaitu:

$H_1 = \text{terdapat perbedaan persepsi antara panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa terhadap implementasi sistem e-procurement.}$

Kerangka Berpikir

Persepsi pengguna dalam implementasi sistem *e-procurement* pemerintah kota Yogyakarta yang dikembangkan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta tertuang dalam kerangka pikir berikut:



Gambar 1: Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kota Yogyakarta dengan obyek penelitian pada lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta, sebagai pengelola sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada lingkup pemerintah kota Yogyakarta.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode angket (kuisisioner) yang menggunakan referensi penelitian yang dilakukan oleh Torkzadeh dan Doll (1991), dengan mengasumsikan bahwa responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya dan pernyataan yang diberikan dapat dipercaya karena adanya persamaan kepehaman akan pernyataan yang diajukan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder berasal dari jelajah situs pada beberapa portal resmi pemerintah daerah, lembaga negara, dan portal pengadaan barang/jasa, serta peraturan perundangan. Keseluruhan data sekunder tersebut diunduh selama masa penelitian dan penulisan.

Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan yaitu sampling bertujuan (*purposive sampling*). Dari sampel yang dipilih dari pihak penyedia akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu penyedia barang, jasa konsultan dan jasa konstruksi. Dengan pengelompokan tersebut diharapkan mereka

mampu mewakili dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Responden penelitian ini terdiri dari panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa yang menjadi rekanan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah kota Yogyakarta. Responden dari penyedia barang/jasa terbagi dalam beberapa kriteria yaitu pemasok barang, konsultan jasa, dan jasa konstruksi berjumlah 100 perusahaan baik berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) maupun Perseroan Terbatas (PT).

Sebagai referensi utama dalam mengukur keberhasilan implementasi *e-procurement*, pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert lima poin (1 = hampir tidak pernah, 2 = jarang, 3 = kadang-kadang, 4 = sering, dan 5 = hampir selalu). Tiap dimensi penilaian terbagi kedalam beberapa pertanyaan, yang berupa hubungan pengguna terhadap isi dan tampilan sistem *e-procurement*. Dari lima dimensi yang diajukan, dikembangkan menjadi 12 pertanyaan yang merefleksikan hubungan pengguna terhadap sistem secara individual dan langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi antara pengelola dan penyedia atas implementasi sistem *e-procurement*. Untuk mengetahui perbedaan persepsi dalam penelitian ini digunakan uji beda *independent simple t-test* (Ghozali, 2006). Tetapi sebelum dilakukan uji beda instrumen kuisisioner penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan realibilitas.

**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan obyek lembaga Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) dan Panitia Pengadaan. Pemerintah Kota Yogyakarta adalah pemerintah daerah pertama di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan pengadaan barang / jasa secara elektronik (*electronic government procurement*) yaitu proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet*.

Karakteristik Sampel

Jumlah responden yang berhasil terkumpul hingga batas akhir pengujian kuisioner adalah 58 sampel yang berasal dari 43 dari sampel penyedia barang/jasa dan 15 dari *Panitia pengadaan*. Tingkat pengembalian kuisioner adalah 65% (58 dari 89 yang ditargetkan). Tabel pertama dalam analisis data dalam penelitian ini meliputi karakteristik responden dari dua kelompok yang berjumlah 58 sampel (Tabel 2).

Kuisioner diisi oleh penyedia barang/jasa maupun *Panitia pengadaan* yang sama-sama menggunakan aplikasi sistem LPSE yang diselenggarakan oleh LPSE Kota Yogyakarta.

Tabel 2: Karakteristik Sampel

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Penyedia barang/jasa	43 orang	100
• <i>Jabatan</i>		
Staf	25	58,1
Supervisor	10	23,3
Lainnya	8	18,6
• <i>Tipe perusahaan</i>		
Jasa konstruksi	17	60,5
Jasa pemasok barang	26	39,5
• <i>Lama keikutsertaan dalam sistem e-procurement</i>		
<1 tahun		
>1 tahun	26	39,5
• <i>Frekuensi keikutsertaan</i>	17	60,5
>5 kali		
<5 kali	20	46,5
	23	63,5
<i>Panitia pengadaan</i>	15	100
• <i>Jabatan</i>		
Staf	12	80,0
Supervisor	3	20,0
Lainnya		
• <i>Lama keikutsertaan dalam sistem e-procurement</i>		
<1 tahun	7	46,7
>1 tahun	8	53,3
• <i>Frekuensi keikutsertaan</i>		
>5 kali	9	60,0
<5 kali	6	40,0

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif tiap konstruk/dimensi dari variabel *e-procurement* dapat dilihat pada tabel 3. Dimana responden mempunyai tanggapan yang berbeda-beda untuk masing-masing konstruk/dimensi dan butir/item pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Dari statistik deskriptif yang

disajikan terlihat bahwa dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner dengan jumlah item pertanyaan sebanyak 12 item yang mengukur variabel sistem pengadaan barang secara elektronik (*e-procurement*) yang terbagi ke dalam lima konstruk/dimensi pengukuran dan 12 butir/item pertanyaan:

Tabel 3: Statistik Deskriptif tiap item pertanyaan

Dimensi	Item pertanyaan	Min	Max	Mean	Deviasi Standar
Isi (<i>Content</i>)	1. Apakah sistem memberikan informasi yang tepat yang anda butuhkan?	1.00	5.00	4.0345	0.8779
	2. Apakah informasi memenuhi kebutuhan anda?	1.00	5.00	3.9483	0.8465
	3. Apakah sistem menghasilkan laporan yang sesuai dengan kebutuhan anda?	3.00	5.00	3.9655	0.7484
	4. Apakah sistem memberikan informasi yang cukup?	2.00	5.00	3.9828	0.7834
Keakuratan (<i>Accuracy</i>)	5. Apakah sistem akurat?	2.00	5.00	3.9483	0.8669
	6. Apakah anda merasa puas dengan keakuratan sistem?	1.00	5.00	3.8621	0.9261
Bentuk (<i>Format</i>)	7. Apakah 'output' yang disajikan dalam format yang berguna	3.00	5.00	3.9138	0.7079
	8. Apakah informasi yang dihasilkan jelas?	2.00	5.00	3.9310	0.7916
Kemudahan Menggunakan (<i>Ease of Use</i>)	9. Apakah sistem akrab dengan pemakai (<i>user friendly</i>)?	2.00	5.00	3.9310	0.8135
	10. Apakah sistem mudah digunakan?	1.00	5.00	4.1379	0.8875
Ketepatan (<i>Timeliness</i>)	11. Apakah anda memperoleh informasi yang anda butuhkan tepat waktu?	1.00	5.00	4.0172	0.9078
	12. Apakah sistem memberikan informasi yang mutakhir (<i>up to date</i>)?	1.00	5.00	4.1207	0.8801

sumber: hasil olah data

Dari deskripsi jawaban responden menunjukkan hampir semua item pertanyaan dijawab pada skala poin 4 (sering). Sebagai contoh pertanyaan dari butir kemudahan istilah *user friendly* dan *easy to use*, responden dapat membedakan dua istilah tersebut dan menjawab pada skala poin 4 (sering). Dalam hal ini membuktikan bahwa responden sering menggunakan sistem pengadaan barang secara elektronik (*e-procurement*). Dilihat dari jawaban responden sistem *e-procurement* sudah memberikan informasi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Begitu juga dengan keakuratan, responden merasa puas dengan keakuratan sistem. Terkait dengan format sistem, responden menanggapi bahwa output yang disajikan

dalam format yang berguna dan jelas. Disisi lain reponden juga menyatakan bahwa sistem *e-procurement* mudah untuk digunakan dan memberikan informasi yang mutakhir (*up to date*).

Persepsi Responden

Persepsi responden penyedia barang/jasa

Tabulasi respon para responden penyedia barang/jasa terhadap sistem pengadaan barang secara elektronik (Tabel 4) secara umum mengindikasikan bahwa sebagian besar responden dengan nilai *mean* dari semua pertanyaan yang mendekati skala poin 4 (sering) menunjukkan bahwa sistem *e-procurement* sudah sering dilakukan dalam sistem pengadaan barang.

Tabel 4: Nilai *mean* respon penyedia terhadap sistem *e-procurement*

Dimensi	Item pertanyaan	Min	Max	Mean	Deviasi Standar
Isi (<i>Content</i>)	1. Apakah sistem memberikan informasi yang tepat yang anda butuhkan?	1.00	5.00	3,8372	0.8978
	2. Apakah informasi memenuhi kebutuhan anda?	1.00	5.00	3,7442	0.8192
	3. Apakah sistem menghasilkan laporan yang sesuai dengan kebutuhan anda?	3.00	5.00	3,7674	0.6844
	4. Apakah sistem memberikan informasi yang cukup?	2.00	5.00	3,9302	0.7986
Keakuratan (<i>Accuracy</i>)	5. Apakah sistem akurat?	2.00	5.00	3,7442	0.8192
	6. Apakah anda merasa puas dengan keakuratan sistem?	1.00	5.00	3,6279	0.9264
Bentuk (<i>Format</i>)	7. Apakah 'output' yang disajikan dalam format yang berguna	3.00	5.00	3,7209	0.6296
	8. Apakah informasi yang dihasilkan jelas?	2.00	5.00	3,7674	0.7507
Kemudahan Menggunakan (<i>Ease of Use</i>)	9. Apakah sistem akrab dengan pemakai (<i>user friendly</i>)?	2.00	5.00	3,6512	0.7199
	10. Apakah sistem mudah digunakan (<i>easy to use</i>)?	1.00	5.00	3,9302	0.9101
Ketepatan (<i>Timeliness</i>)	11. Apakah anda memperoleh informasi yang anda butuhkan tepat waktu?	1.00	5.00	3,8605	0.9149
	12. Apakah sistem memberikan informasi yang mutakhir (<i>up to date</i>)?	1.00	5.00	3,9767	0.8860

1= hampir tidak pernah 2= jarang, 3=kadang-kadang, 4=sering, 5=hampir selalu

Dapat dilihat dari respon para responden penyedia barang/jasa pada 12 item pertanyaan yang terdiri dari lima dimensi yang mengukur sistem pengadaan barang secara elektronik (*e-procurement*) dimana dari sebagian besar para responden menanggapi cukup positif.

Persepsi Responden Panitia Pengadaan

Tabulasi respon para responden panitia pengadaan terhadap sistem pengadaan barang secara elektronik (Tabel 5) secara umum mengindikasikan bahwa sebagian besar responden merespon bahwa sistem *e-procurement* sudah sering dilakukan dalam sistem pengadaan barang. Dimana hal terse-

but ditunjukkan nilai *mean* untuk semua item pertanyaan diatas nilai 4,1.

Respon para responden panitia pengadaan pada 12 item pertanyaan yang terdiri dari lima dimensi yang mengukur sistem pengadaan barang secara elektronik (*e-procurement*) cukup berbeda dengan respon dengan tanggapan dari penyedia sistem *e-procurement*, dimana dari sebagian besar para responden menanggapi dengan positif dimana nilai *mean* mencapai lebih dari 4,13. Bahkan dalam jawaban responden tidak ada yang berpendapat tidak pernah atau jarang pada item pertanyaan yang terkait sistem pengadaan barang secara elektronik.

Tabel 5: Nilai *mean* respon panitia terhadap sistem *e-procurement*

Dimensi	Item pertanyaan	Min	Max	Mean	Deviasi Standar
Isi (<i>Content</i>)	1. Apakah sistem memberikan informasi yang tepat yang anda butuhkan?	4.00	5.00	4,6000	0.5070
	2. Apakah informasi memenuhi kebutuhan anda?	3.00	5.00	4,5333	0.6399
	3. Apakah sistem menghasilkan laporan yang sesuai dengan kebutuhan anda?	3.00	5.00	4,5333	0.6399
	4. Apakah sistem memberikan informasi yang cukup?	3.00	5.00	4.1333	0.7432
Keakuratan (<i>Accuracy</i>)	5. Apakah sistem akurat?	3.00	5.00	4,5333	0.7432
	6. Apakah anda merasa puas dengan keakuratan sistem?	4.00	5.00	4,5333	0.5164
Bentuk (<i>Format</i>)	7. Apakah 'output' yang disajikan dalam format yang berguna	3.00	5.00	4,4667	0.6399
	8. Apakah informasi yang dihasilkan jelas?	3.00	5.00	4,4000	0.7367
Kemudahan Menggunakan (<i>Ease of Use</i>)	9. Apakah sistem akrab dengan pemakai (<i>user friendly</i>)?	4.00	5.00	4,7333	0.4577
	10. Apakah sistem mudah digunakan?	4.00	5.00	4,7333	0.4577
Ketepatan (<i>Timeliness</i>)	11. Apakah anda memperoleh informasi yang anda butuhkan tepat waktu?	3.00	5.00	4,4667	0.7432
	12. Apakah sistem memberikan informasi yang mutakhir (<i>up to date</i>)?	3.00	5.00	4,5333	0.7432

1= hampir tidak pernah 2= jarang, 3=kadang-kadang, 4=sering,5=hampir selalu

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Hasil uji validitas dan realibilitas instrumen penelitian yang disebar pada panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa juga menunjukkan bahwa semua butir/item pertanyaan berkorelasi dengan skor total konstruk/dimensi secara signifikan, semua konstruk/dimensi dari variabel *e-procurement* tersebut mempunyai tingkat signifikan di bawah 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tiap item pertanyaan tersebut adalah valid dan dapat digunakan untuk mengukur konstruk/dimensi dalam penelitian ini.

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas, peneliti menggunakan metode *internal consistency* dengan menggunakan *cronbach's alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan jawaban yang konsisten dari waktu ke waktu dan memberikan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 (Nunnaly, 1967 dalam Ghozali 2006). Dari hasil tabel 8 di atas terlihat bahwa koefisien *alpha* setiap konstruk/dimensi dalam variabel *e-procurement* semuanya bernilai > 0,60. Dengan demikian jawaban dari masing-masing pertanyaan dalam tiap konstruk/dimensi pada kuisioner tersebut dapat dikatakan reliable.

Tabel 6: Hasil uji validitas

Variabel Sistem Pengadaan Barang (<i>e-procurement</i>)	Pearson Correlation	Tingkat Sig.
<i>dengan dimensi:</i>		
Isi (<i>Content</i>)		
informasi	0,865	0,000
kebutuhan	0,880	0,000
laporan	0,825	0,000
kecukupan	0,805	0,000
Keakuratan (<i>Accuracy</i>)		
akurat	0,894	0,000
kepuasan	0,908	0,000
Bentuk (<i>Format</i>)		
Berguna	0,844	0,000
Jelas	0,879	0,000
Kemudahan Menggunakan (<i>Ease of Use</i>)		
User friendly	0,920	0,000
Easy to use	0,933	0,000
Ketepatan (<i>Timeliness</i>)		
Tepat waktu	0,907	0,000
Mutakhir	0,901	0,000

Sumber: hasil olah data

Tabel 7: Hasil uji reliabilitas

Variabel Sistem Pengadaan Barang (<i>e-procurement</i>)	Item pertanyaan	Cronbach's Alpha
<i>dengan dimensi:</i>		
Isi (<i>Content</i>)	1-4	0,865
Keakuratan (<i>Accuracy</i>)	5-6	0,894
Bentuk (<i>Format</i>)	7-8	0,768
Kemudahan Menggunakan (<i>Ease of Use</i>)	9-10	0,655
Ketepatan (<i>Timeliness</i>)	11-12	0,776

Sumber : hasil olah data

HASIL ANALISIS DATA (UJI BEDA)

Sebagai tahapan akhir dari proses pengujian dalam penelitian ini adalah dilakukan uji beda untuk mengetahui persepsi atas sistem *e-procurement* pada dua kelompok responden secara keseluruhan yang didapat dengan membandingkan nilai rata-rata respon masing-masing kelompok. Hasil perhitungan dari data yang diperoleh secara studi empiris disajikan dalam tabel 8

Terlihat bahwa dari output SPSS bahwa F hitung *levene test* sebesar 5.039 dengan probabilitas 0.029. Oleh karena probabilitas kurang dari <0.05 maka dapat disimpulkan mempunyai asumsi *equal variance not assumed*. Dari output SPSS terlihat bahwa nilai t pada *equal variance not assumed* adalah -5.958 dengan probabilitas signifikansi 0.000 (*two tail*). Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara pengguna *e-procurement* yaitu penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan.

Kehadiran teknologi sebagai penunjang dalam kegiatan pelayanan publik berupa *e-government* dan pengadaan barang dan jasa pemerintah berupa *e-procurement* membawa dampak positif dalam berbagai hal, terutama dalam menciptakan transparansi publik dan efektivitas kegiatan pengadaan barang dan jasa. Penggunaan perangkat internet dalam menunjang kegiatan pada pemerintah tersebut juga membawa dampak yang berupa kesenjangan digital bagi para pemakainya baik itu pemerintah secara khusus sebagai penentu kebijakan maupun masyarakat pada umumnya.

Kesenjangan digital dalam penerapan *e-procurement* dapat terjadi dengan berbagai alasan diantaranya ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi penunjang, serta kurangnya upaya dan kesadaran dari dalam diri masing-masing individu pengguna layanan *e-procurement* itu sendiri.

Situasi yang terjadi pada awal implementasi sistem *e-procurement* di peme-

rintah Kota Yogyakarta menunjukkan kondisi yang sesuai dengan tahapan *moving* dalam teori Lewin (1951) bahwa suatu perubahan memerlukan waktu untuk mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya dan diharapkan mampu membantu memecahkan masalah (Clarke, 1998).

Teori resistensi oleh Kotter & Schlesinger (1979) dalam Clarke (1998) menyebutkan bahwa dalam menghadapi perubahan sistem baru, masing-masing pihak yang terlibat dalam penerapannya seringkali mengatasi perubahan dengan cara komunikasi, partisipasi, fasilitasi, negosiasi, dan sedikit paksaan. Menurut teori ini teknik yang berbeda-beda tergantung pada tingkat resistensi masing-masing kelompok (Kasali, 2005).

Bila dilihat dari sisi LPSE Kota Yogyakarta sebagai fasilitator sistem *e-procurement*, telah mencoba mengenalkan aplikasi tersebut kepada panitia dan penyedia dalam bentuk pelatihan dan *help desk*. Dari sisi regulator, dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah, dengan adanya kewajiban menggunakan sistem *e-procurement* pada tahun 2010, dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan unsur paksaan dalam penerapan sebuah sistem baru, dengan adanya beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan digital dalam penerapan sistem *e-procurement* oleh pemerintah kota Yogyakarta yaitu antara panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa. Meskipun kesenjangan digital antar pengguna sistem *e-procurement* tidak terlampau lebar, namun hal tersebut harus diatasi dan dijumpai oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sebagai pengembang sistem agar tercipta fungsionalisasi sistem *e-procurement* oleh semua pihak.

Tabel 8: Hasil Uji Beda T-test

Variabel	Variance populasi	Nilai levene Test		Nilai t-test	
		F	Sig.	t	Sig.
<i>E-procurement</i>	Equal variances assumed	5.039	.029	-4.535	.000
	Equal variances not assumed			-5.958	.000

Sumber: hasil olah data

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Perbedaan persepsi kedua kelompok pengguna sistem *e-procurement* yaitu panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa pada pemerintah kota Yogyakarta dimungkinkan adanya perbedaan sikap dalam menghadapi perubahan sistem pengadaan dari konvensional ke sistem baru *e-procurement* sehingga mempengaruhi tindakan masing-masing dalam pemahaman dan penggunaan sistem tersebut. Perbedaan persepsi tersebut membawa dampak berupa kesenjangan digital antar pengguna sistem *e-procurement*.

Kesenjangan digital dalam implementasi *e-procurement* bukanlah masalah sederhana yang dapat dibiarkan begitu saja. Perbedaan persepsi berarti adanya kesenjangan digital antara panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa mencerminkan sistem yang dikembangkan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Yogyakarta belum sepenuhnya teraplikasi dengan optimal.

Dengan adanya hasil analisa data yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi kedua kelompok pengguna sistem *e-procurement* yaitu panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa pada pemerintah kota Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem *e-procurement* yang sedang dijalankan oleh pemerintah

kota Yogyakarta saat ini akan dikatakan berhasil bila kesenjangan digital yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa tersebut dapat diatasi.

Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan di pemerintah kota Yogyakarta, yang saat ini sedang menjalankan perubahan sistem pengadaan barang/jasa dari sistem konvensional ke sistem elektronik dan sedang memasuki tahun kedua. Dengan rentang waktu yang cukup pendek, gambaran tentang obyek penelitian belum cukup jelas mengingat obyek penelitian dalam hal ini LPSE Kota Yogyakarta maupun seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan *e-procurement* sedang berada dalam tahap yang sama yaitu proses penyesuaian atas perubahan sistem pengadaan konvensional ke sistem elektronik.

Penelitian ini merupakan studi kasus di salah satu pemerintah daerah yang tidak bisa digunakan secara menyeluruh atas implementasi sistem yang sama di daerah lain.

Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian dan hasil yang didapat dari penelitian ini, maka saran yang bisa penulis berikan diantaranya:

1. Melihat hasil penelitian yang berupa perbedaan persepsi pengguna antara panitia dan penyedia barang/jasa,

sebaiknya LPSE Kota Yogyakarta dapat lebih meningkatkan sosialisasi sistem *e-procurement* yang sedang berjalan.

2. Adanya kesenjangan digital yang terjadi pada sebagian besar penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan, dapat disebabkan oleh berbagai hal misalnya langkanya sumber daya yang handal, budaya penggunaan teknologi infrastruktur yang memadai dalam hal akses internet, hendaknya menjadikan mereka yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah meningkatkan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Kesadaran akan *melek* teknologi menjadi unsur utama dalam penerapan sistem *e-procurement*.
3. Perubahan sistem konvensional ke sistem *on-line* tentunya membawa dampak bagi semua pihak yang selama ini terlibat dalam suatu kegiatan pengadaan barang/jasa. Hal ini pula yang terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah kota Yogyakarta. Bisa jadi bahwa sistem konvensional menjadi cara yang paling baik bagi beberapa pihak yang kurang setuju dengan sistem baru, sedangkan tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa pihak yang lain lebih memilih sistem baru karena beroleh manfaat secara langsung. Untuk itu perlu diadakan penelitian yang menguji efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa diukur dari sistem yang digunakan.
4. Keberhasilan sebuah sistem baru akan dapat diukur dengan jelas bila dari sisi waktu implementasi dan proses penerapannya telah berjalan cukup matang dan sesuai dengan rencana. Perlu diadakan penelitian serupa pada waktu mendatang guna mengukur tingkat keberhasilan implementasi sistem *e-procurement*. Saat ini, baik dari sisi pengembang sistem yaitu LPSE

Kota Yogyakarta, panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa, sedang memasuki tahun kedua implementasi sistem, dimana ketiganya sama-sama berada pada proses awal adaptasi.

5. Adanya kewajiban bagi semua instansi pemerintah untuk menggunakan sistem baru pengadaan barang/jasa secara *on-line*, diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya guna membandingkan keberhasilan sistem antar lembaga publik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ary, D., Jacobs, LC., Ravazieh. (1982). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Terj. Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional
- Asmadewa, I. (2006). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Survei pada Pemerintah Pusat). *Thesis UGM*. Unpublished.
- Assar, Said. (2008). *Collaborative Features in French Publik E-procurement*. Universite de Savoie, Institut de Recherche en Gestion et en Economie (IREGE). Hal 83-103.
- Australian Government. Department of Finance and Administration. (2005). *Review of E-procurement Demonstration Project*. Pada www.agimo.gov.au
- Awad. (2004). Consumer trust in B2C e-Commerce and the importance of social presence: experiments in e-Products and e-Services. *Omega*. Vol. 32. Hal 1-13.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. *Payung Hukum Kegiatan*

- Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik*. 2009. Pada www.bappenas.go.id
- Bjorklund. (2000). Perception and Its Effect : Factors influencing e-procurement usage. *Public Procurement*. Hal 43-60.
- Bruno, G. (2005). A Multicriteria Approach to Evaluate E-procurement Web Sites. *Journal of Public Procurement*. Vo. 5. Hal 492-508.
- Clarke, L. (1998). *Manajemen Perubahan* (Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- deBoer, L., J. (2002). *Electronic Commerce, A managerial Perspective*. New Jersey: Pearson Education Inc..
- DeLone, W., dan McLean. (2003). The DeLone and McLean Model of Information System Success : A Ten Year Update. *Journal of Management Information Systems*, Vol 19. Hal 9-30.
- Dessler, G. (2003). *Human Resource Management*. Ninth Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- E-procurement at Scotland*. (2009). Pada www.eprocurementscotlandia.com
- Forum Pengadaan. (2008). *Kebocoran dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Pada www.iprocwatch.go.id
- Giunipero, L. dan Sawchuck. (2002). E-Purchasing Plus: Chaning the way corporations buy. *Journal of Public Procurement*, Issue 3. Vol 28. Hal 54-62.
- Hammer, Michael dan Champy, James. (2003). *Reengineering the Corporation*. New York: Harper Business Essentials.
- Handoko. (2009). *Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa*. Pada www.yogyakarya.com.
- Hans Kelsen. (2009). *Hukum dan Implikasinya*. Pada www.polhukam.kompas.com
- Hardjowijono. (2009). *Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Publik di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Procurement Watch.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilias, Azleen, Rusdan, Mohd., Razak, Mohd. (2007). The Study of End-User Computing Satisfaction (EUCS) on Computerised Accounting System (CAS) Among Labuan F.T. Government Sectors: A Case Study in The Responsibility Centres. *Labuan e-Journal of Muamalat and Society*, Vol. 1. Hal 1-13
- Ippolito, Sarzana. (2003). *Knowing E-procurement*. Information Systems Forensic Assosiation. Inc.
- Iqbal Hasan. (2004). *Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iwan Arif, Wijayanto. (2007). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerapan Sistem E-procurement di Pemkot Surabaya. *Tesis UGM*.
- Jaworski, Frochlich. (2002). E-integrations in the Supply Chain. *Decision Science*. Hal 20-29.
- Jogiyanto, (2007). *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Jogjakarta: Andi Offset.
- Jones, Brandon. (2009). Improving e-procurement compliance: The Role of user perceptions. *POMS 20th*

- Annual Conference, Orlando, Florida, U.S.A.* Hal 1-21.
- Karwan, Bellardo dan Wallace. (1982). DSS Component design Through Field Experimentation: An Applycion to Emergency Mangement. *Proceedings of the 3rd International Conference on Information Systems*.
- Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Keputusan Presiden nomor 228 tahun 2001 tentang E-Government.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia nomor 57 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan *E-Government* Indonesia.
- Khasali, R. (2005). *Change*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Mencegah Korupsi Melalui E-procurement*. Pada www.kpk.go.id.
- Kristiadi, (2006). *Pedoman Good Corporate Governance*. Jakarta: Kanisius.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). (2009). *Sistem dan Prosedur Pengadaan*. Pada www.lkpp.go.id
- Marzuki. (2003). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE UII.
- Markus, M. L. (1983). *Power, Politics, and MIS Implementation*. *Communications of the ACM*. Hal. 430-444.
- Mulyanto. (2008). Analisis implementasi E-procurement pada Badan Usaha Milik Negara, Studi Kasus pada PT. (persero) Pupuk Sriwijaya, PT. (persero) Industri Gelas dan PT. (persero) Angkasa Pura II. *Tesis IPB*.
- Nugroho, Rino. (2006). Studi Penjelajahan tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Internet di Departemen Pekerjaan Umum. *Spirit Publik*. Vol. 2. Hal 75-80.
- O'Brien, J. (2006). *Introduction to Information systems*. Mc. Graw Hill.
- Paul O. Harrigan. (2008). The Development of E-procurement within the ICT Manufacturing Industry in Ireland. *Management Decision*. Emerald Group Publishing Limited. Vol. 46. Hal 481-500.
- Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 31 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta.
- Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 18 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta.
- Pikkarainen, Kari. (2006). The Measurement of End-user Computing Satisfaction of Online Banking Services: empirical Evidence from Finland. *International Journal of Bank Marketing*, Vol 24. Issue 3. Hal 158-172.
- Praktek-praktek yang baik di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Jawa Barat.

- (2009). *Seri Manajemen Pelayanan Publik*. Hal 21-23. Pada www.lpse.jawabarat.go.id
- Prasentanyoko. (2008). *Corporate Governance dan Pendekatan Institusional*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Prabowo, Akbar. (2005). Analisis Terhadap Kesiapan Penerapan E-procurement di Lingkungan Kabupaten Sleman. *Tesis UGM*.
- Purwanto. (2007). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Puspito, Edy. (2007). E-Proc dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. *Simposium Ahli Pengadaan Nasional ke-2*.
- Rafiqul. (2007). Publik Procurement and Contracting in Bangladesh : An Analysis of the Perceptions of Civil Servants. *Journal of Public Procurement*, Boca Raton. Vol 7, Hal 31-50.
- Rahman, Andy. (2007). Tinjauan Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-procurement. *Tesis UNAIR*.
- R. Palmer. (2003). Moving Procurement Systems to the Internet : the adoption and use of e-procurement technology models. *European Management Journal*, Vol. 44. Hal 17-25.
- Satriya, Eddy. (2006). *Pentingnya Revitalisasi E-Government di Indonesia*. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia*.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT Sekawan.
- Setiawan, Deris. (2002). *Electronic Commerce*. Jogjakarta: Andi Offset.
- Srinivasan, A. (1985). Alternative Measures of Sistem Effectiveness. Associations and Implications. *MIS Quarterly*. Vol 9. Hal 243-253.
- Sulinar, Nurliya. (2007). Analisis Kepuasan Users pada Penerapan Sistem E-procurement Pemerintah Kota Surabaya. *Tesis UNAIR*.
- Supranto, J. (2001). *Statistika Teori dan Aplikasi*. Edisi Keenam Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Surat Keputusan Menteri Perekonomian nomor 14 tahun 2008 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Governance.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Aspek-aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Torkzadeh, Gholamreza dan William Doll., (1991). Test-Retest Reliability of the End-User Computing Satisfaction Instrument. *Decision Sciences*. Vol. 22. Hal 26-37.
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kelima. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Walker, Helen dan Christine Harland. (2008). *E-procurement in the United Nations: Influences, Issues and Impact*. *International Journal of Operations and Production Management*. Vol. 28. Hal 195-219.